



## **SIARAN PERS KPPU**

Nomor 26/KPPU-PR/IV/2020

### **KPPU TINDAKLANJUTI INFORMASI MENTERI BUMN TENTANG DUGAAN 'MAFIA' ALAT KESEHATAN**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyurati Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperoleh informasi lanjutan terkait dugaan keberadaan mafia alat kesehatan di Indonesia. Khususnya dalam mendalami apakah terdapat potensi kartel oleh para pelaku usaha di bidang kesehatan untuk bersepakat mengatur produksi dan pasokan alat kesehatan di Indonesia. Apabila memang terbukti adanya kartel atau pelanggaran lain dalam alat kesehatan tersebut, KPPU tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi maksimal bagi pelaku usaha yang mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya pada masa darurat bencana nasional Covid-19 ini.

Seperti diketahui, Menteri BUMN dalam beberapa waktu terakhir ini menggarisbawahi adanya dugaan adanya praktik mafia alat kesehatan yang selama ini mendorong Indonesia untuk lebih memilih impor alat kesehatan daripada memproduksinya di dalam negeri. Hal tersebut diindikasikan dari tingginya impor Indonesia untuk produk alat kesehatan tersebut, salah satunya ventilator. Jika ungkapan Mafia kesehatan tersebut merupakan wujud perilaku pelanggaran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Tentunya, informasi tersebut merupakan hal yang berharga bagi KPPU dalam menjalankan tugas pengawasan hukum persaingan usaha. Kerja sama dalam hal pemberian data, informasi dan bukti merupakan dukungan bagi KPPU dalam menjalankan tugas tersebut.

Juru Bicara KPPU, Guntur S. Saragih menyebutkan bahwa bidang kesehatan telah menjadi prioritas pengawasan di KPPU sejak beberapa tahun terakhir, sehingga telah melakukan berbagai tindakan penegakan hukum di bidang tersebut. Dijelaskan bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi di bidang tersebut meliputi kartel penetapan harga obat-obatan serta konspirasi dan kolusi dalam pengadaan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit.

\*\*\*

Siaran Pers ini disampaikan pada 23 April 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk pertanyaan atau klarifikasi lanjutan terkait Siaran Pers ini, dapat dilakukan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id). Terima kasih.